



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik serta perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu dilakukan klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
8. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
10. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh

pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan negara.

11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
12. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
14. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan BSN.
16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan BSN.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional menjadi acuan seluruh unit kerja dalam pengelolaan arsip dinamis bagi tersedianya informasi BSN yang dapat diakses secara luas bagi publik baik untuk Pengguna Internal maupun Pengguna Eksternal.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- b. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- c. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:
 - a. Klasifikasi Keamanan Arsip;
 - b. Pengamanan arsip; dan
 - c. Klasifikasi Akses Arsip.
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia Dan Sangat Rahasia;
- (3) Pengamanan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur penentuan pengelolaan arsip dan daftar informasi yang bersifat Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia.
- (4) Klasifikasi Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.

Pasal 4

Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis disusun dengan memperhatikan ketentuan:

- a. arsip yang tercipta terdiri atas 4 (empat) tingkat klasifikasi yaitu informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia;

- b. arsip yang tercipta dalam 4 (empat) tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki perbedaan dalam pengaturan aksesnya.
- c. setiap aparatur sipil negara BSN hanya dapat mengakses arsip dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya; dan
- d. publik dapat mengakses informasi BSN yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan BSN menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*Software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 6

- (1) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus memiliki

kompetensi dalam bidang kearsipan dan dedikasi serta integritas.

- (2) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

Arsip Dinamis BSN terbagi menjadi 4 (empat) kategori antara lain:

- a. Biasa/Terbuka;
- b. Terbatas;
- c. Rahasia; dan
- d. Sangat Rahasia.

Pasal 8

Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan arsip dinamis yang bobot informasinya memiliki dampak yang dapat menghambat kinerja unit teknis di lingkungan BSN, terdiri atas:

- a. Sekretariat utama meliputi:
 - 1) biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, keuangan dan tata usaha;
 - 2) biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan hukum; dan
 - 3) biro yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang hubungan masyarakat, kerja sama dan layanan informasi;
- b. Deputi bidang pengembangan standar meliputi
 - 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal;
 - 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan standar mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi; dan

- 3) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif.
- c. Deputi bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian meliputi:
- 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
 - 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
- d. Deputi bidang akreditasi meliputi
- 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi;
 - 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang akreditasi laboratorium; dan
 - 3) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.
- e. di lingkup kedeputian bidang standar nasional satuan ukuran meliputi
- 1) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi, dan biologi; dan
 - 2) direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia
- f. unit kerja yang menangani pengawasan intern BSN;
- g. Pusat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- h. Pusat yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang data dan sistem informasi.

Pasal 9

Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan arsip dinamis yang bobot informasinya

memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan BSN terdiri atas:

- a. unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan hukum;
- b. unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, keuangan, dan umum;
- c. unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di lingkup deputi bidang pengembangan standar seperti dokumen persiapan perumusan SNI;
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di lingkup deputi bidang akreditasi;
- f. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi di lingkup deputi bidang standar nasional satuan ukuran.

Pasal 10

Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yang berdampak-luas sehingga mengganggu kinerja BSN, terdiri atas:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan hukum;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, keuangan, dan umum;

Pasal 11

Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditentukan oleh Pencipta Arsip.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan arsip dinamis membutuhkan pengamanan ruang simpan.

- (2) Pengamanan ruang simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas pengamanan yang terdiri atas:
 - a. kamera pengawas;
 - b. kunci pengamanan ruangan;
 - c. media simpan arsip; dan/atau
 - d. alat pemadam api ringan.
- (3) Penyimpanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. rak besi untuk kategori Biasa/Terbuka;
 - b. lemari arsip untuk kategori Terbatas;
 - c. lemari besi untuk kategori Rahasia; dan
 - d. media simpan dengan keamanan ganda di zona aman untuk kategori Sangat Rahasia.

Pasal 13

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis meliputi penciptaan daftar arsip Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia.
- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *records centre* dan *central file*.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip dan Klasifikasi Arsip Dinamis terbagi menjadi 2 (dua) fungsi;
 - a. Failitatif; dan
 - b. Substantif.
- (2) Tabel Klasifikasi Keamanan Arsip dan pengamanan Klasifikasi Akses Arsip dinamis tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1071

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR :19 TAHUN 2019

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

FUNGSI FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH (YANG MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG)
I. KEPEGAWAIAN						
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN						
1.	KP.00	Penyusunan dan Penetapan kebutuhan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.00.00	<i>Bezzeting</i> / Persediaan Pegawai				
		1. Data Pegawai hasil pengklasifikasian				
		2. Kajian data pegawai				
		3. Konsep data <i>bezzeting</i>				
		4. Evaluasi proses penyusunan data <i>bezzeting</i>				
		5. Hasil dan laporan data <i>bezzeting</i>				
		6. Data Pegawai hasil pengklasifikasian				
	KP.00.01	Formasi Pegawai				
		1. Usulan dari Unit Kerja				
		1) Analisis Jabatan				
		2) Beban Kerja				

		2. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RB dan Kepala BKN				
		3. Persetujuan Formasi dari Menpan dan RB				
		4. Penetapan Formasi PNS dan Formasi Khusus				
2.	KP.01	Pengadaan Pegawai				
	KP.01.00	Penerimaan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Pengumuman				
		2. Seleksi administrasi				
		3. Pemanggilan peserta tes				
		4. Pelaksanaan ujian tertulis				
		5. Keputusan hasil ujian tertulis				
		6. Pelaksanaan tes kemampuan bidang				
		7. Wawancara				
		8. Penetapan Pengumuman Kelulusan				
		9. Berkas Lamaran yang Tidak Diterima				
	KP.01.01	Pengangkatan CPNS dan PNS				
		1. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		a. Surat lamaran				
		b. Ijazah				
		c. SKCK				
		d. Pelaksanaan Uji Kesehatan				
		e. Surat keterangan kesehatan				
		2. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih 2 Tahun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum

					pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	
		3. Surat Keputusan CPNS/ PNS Kolektif	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.01.02	Prajabatan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	
3.	KP.03	Ujian Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.03.00	<i>Assesment Test Pegawai</i>				
	KP.03.01	<i>Pemetaan/ Talent Mapping Pegawai</i>				
4.	KP.04	Mutasi				
	KP.04.00	Usul Kenaikan Pangkat/ Golongan/ Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.04.01	Berkas Pengurusan Gaji Berkala	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.04.02	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.04.03	Penyesuaian Kelas Jabatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.04.04	Rotasi Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.04.05	Mutasi Keluarga	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum

					pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	
		1. Surat izin pernikahan/perceraian				
		2. Surat penolakan izin				
		3. Akta nikah/cerai				
		4. Akta kelahiran anak				
		5. Surat keterangan meninggal dunia				
	KP.04.06	Alih Tugas				
		1. Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, mutasi antar unit kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		2. Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN dan Kepala Badan Stanadardisasi Nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		3. Berita acara pelantikan dan serah terima jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
5.	KP.05	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.05.00	Pengangkatan Jabatan				
		1. Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional				
		2. Berkas Baperjakat				
	KP.05.01	Pemberhentian Jabatan				
		Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai				

6.	KP.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai/Ujian Penyesuaian Ijazah				
		a. Surat Perintah/ Surat Tugas/SK/Surat Izin				
		b. Laporan Kegiatan Pengembangan Diri				
		2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)/Sertifikat				
7.	KP.08	Penilaian Kinerja, Disiplin, Kode Etik				
	KP.08.00	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		Pakta integritas pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.08.02	Data Presensi				
		1. Rekapitulasi daftar hadir	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		2. Berkas Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.08.03	Disiplin Pegawai				
		1. Berkas hukuman disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum

8.	KP.09	Administrasi Pegawai				
		Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.09.00	Dokumentasi Identitas Pegawai				
	KP.09.01	1. Usul penetapan kartu 2. Keanggotaan Organisasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		3. Laporan Pajak Penghasilan Pribadai (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP				
	KP.09.06	4. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)				
	KP.09.05	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.09.07	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
9.	KP.10	Cuti Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	KP.10.00 / KP.10.01/ KP.10.02/ KP.10.03	Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit , Cuti Melahirkan				
	KP.10.04	Cuti Alasan Penting				
	KP.10.05	Cuti Diluar Tanggungan Negara				
10.	KP.11	Pembinaan Jabatan Fungsional				

	KP.11.03	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
11.	KP.12	Kesejahteraan Pegawai				
	KP.12.00	a. Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		b. Berkas Layanan Asuransi Pegawai				
	KP.12.03	c. Berkas tentang layanan tabungan perumahan				
		d. Berkas tentang layanan tabungan pensiun				
12.	KP.13	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
13.	KP.14	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Tewas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
14.	KP.15	Organisasi Non Kedinasan meliputi Korpri dan Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
15.		Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Lamaran Yang Diterima				
		2. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya				
		3. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				
		4. SK Pengangkatan CPNS				
		5. Hasil Pengujian Kesehatan				
		6. SK Pengangkatan PNS				
		7. SK Peninjauan Masa Kerja				

		8. SK Kenaikkan Pangkat				
		9. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan				
		10. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional				
		11. Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan				
		12. SK Perpindahan Wilayah Kerja				
		13. SK Perpindahan Antar Instansi				
		14. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)				
		15. Berita Acara Pemeriksaan				
		16. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS				
		17. SK Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan di luar Instansi Induk				
		18. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan				
		19. SK Pemberian Uang Tunggu				
		20. SK Pemberhentian sebagai PNS				
		21. SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara				
		22. SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Pejabat Negara				
		23. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara				
		24. SK Pengalihan PNS				
		25. Surat Keterangan Pernyataan Hilang				

		26.Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang				
		27.SK Penggantian Nama				
		28.Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran				
		29.Akta Nikah/Cerai				
		30.Akta Kelahiran				
		31.Isian Formulir PUPNS				
		32.Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan				
		33.Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol				
		34.Surat Keterangan Meninggal Dunia/ Hilang				
		35.Surat Keterangan Mutasi Keluarga				
		36.Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan				
		37.Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional				
		38.Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus				
		39.Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala				
		40.Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri				
		41.Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri				
		42.Surat Persetujuan dan SK perubahan data dasar/ status/ kedudukan hukum kepegawaian				
		43.Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS				
		44.Ijazah/Sertifikat				

		45.SK Penempatan/Penarikan Pegawai				
		46.SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi Induk				
		47.Surat Pertimbangan Status PNS				
		48.SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS				
		49.Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah				
		50.SK Penghargaan dan Tanda Jasa				
		51.SK Pensiun				
14.		Berkas Perseorangan Kepala Badan Standardisasi Nasional	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
II. KEUANGAN						
1.	KU.00	Pelaksanaan Anggaran				
	KU.00.01	1. Daftar Gaji / Tunjangan / Lembur / Honorarium	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	perencanaan, keuangan, dan umum
		2. Kartu Gaji	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta	perencanaan, keuangan, dan umum

					merusak kemitraan dan reputasi	
	KU.00.02	Dokumen Pembayaran Keuangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Pengajuan kebutuhan penarikan kas				
		2. Bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga				
		3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				
		4. Surat Perintah Membayar (SPM)				
		5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				
2.	KU.01	Pengelolaan Perbendaharaan				
	KU.01.00	1. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		a. Kuasa Pengguna Anggaran				
		b. Kuasa Pengguna Barang/Jasa				
		c. Pejabat Pembuat Komitmen				
		d. Pejabat Penandatanganan SPM				
		e. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran				
		f. Pengelola Barang termasuk berita acara serah terima jabatan				
		2. Dokumen Realisasi Pendapatan:				
	KU.01.02	a. Surat Setoran Pajak (SSP)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum

	KU.01.03	b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
	KU.01.04	c. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja				
		d. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank				
		e. Laporan realisasi pendapatan negara				
		f. Berkas kelebihan pembayaran gaji atau tunjangan kinerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		3. Laporan hasil pemeriksaam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		4. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		5. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		a. Tuntutan Perbendaharaan				
	KU.01.06	b. Tuntutan Ganti Rugi				
	KU.01.07	1. Buku Kas Umum (BKU)				
		2. Buku Kas Pembantu (BKP)				
	KU.01.01	3. Buku/kartu pengawasan kredit anggaran				
		4. Rekening koran bank				

		5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)				
		6. Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK)				
		7. Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga				
		8. Daftar Rekapitulasi PNBPN				
		9. Izin penggunaan kas besi				
3.	KU.02	Verifikasi Anggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Nota Hasil Verifikasi (NHV)				
		2. Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV)				
4.	KU.03	Akuntansi dan Pelaporan				
		1. Dokumentasi Akuntansi Keuangan:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	KU.01.05	a. Berita Acara Pemeriksaan Kas				
		b. Kas/Register Penutupan Kas				
		c. Arsip Data Komputer (ADK)				
		Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN				
	KU.03	2. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari:	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
		b. Neraca				
		c. Laporan Arus Kas (LAK)				
		d. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)				

		e. Laporan Barang Milik Negara (BMN)				
		f. Laporan realisasi pendapatan negara				
		3. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)				
		a. Manual implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		b. Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		d. Laporan realisasi semesteran APBN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
5.	KU.04	Ketatausahaan Keuangan				
	KU.04.03	Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
III. PERSURATAN DAN KEARSIPAN						
1.	KA.00	Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Buku Agenda				
		2. Lembar Pengantar/buku ekspedisi				
2.	KA.01	Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	KA.01.00	Penyusunan Sistem				

	KA.01.01	Pembinaan				
		1. Sosialisasi / penyuluhan kearsipan / <i>workshop</i>				
		2. Bimbingan teknis				
	KA.01.02	Monitoring				
		Supervisi dan monitoring				
	KA.02	Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	KA.02.00	Penyimpanan dan Pemeliharaan arsip	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	
		1. Daftar Arsip				
		2. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan				
		3. Daftar pencarian arsip				
		4. Daftar arsip informasi publik				
		5. Daftar Arsip Vital/Aset				
	KA.02.01	Layanan arsip (peminjaman, penggunaan arsip), Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	KA.03	Penyusutan Arsip	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	KA.03.00	1. Pemindahan arsip inaktif				
		a. Berita acara pemindahan				
		b. Daftar arsip yang dipindahkan				
	KA.03.01	2. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna				
		a. Berita acara pemusnahan				
		b. Daftar arsip yang dimusnahkan				
		c. Rekomendasi/pertimbangan / pemusnahan arsip dari				

		Arsip Nasional Republik Indonesia				
		d. Surat Keputusan Pemusnahan				
	KA.03.02	3. Penyerahan arsip statis				
		a. Berita acara serah terima arsip				
		b. Daftar arsip yang diserahkan				
IV. PERLENGKAPAN						
	PL.00	Rencana Kebutuhan Barang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Unit Kerja/satuan kerja				
		2. Lembaga (Badan Standardisasi Nasional)				
	PL.00.02	Sosialisasi/ <i>workshop</i> /Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa				
		1. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi pengadaan barang/jasa				
		2. Laporan hasil pelaksanaan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi pengadaan barang dan jasa				
	PL.01	Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Telaahan pelaksanaan lelang/pemilihan/penunjukan langsung				
		2. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengumuman lelang,				

		sampai dengan kontrak dan serah terima barang				
	PL.01.00 / PL.01.01	1. Barang pakai habis				
		2. Barang inventaris :				
	PL.01.03	a. Barang bergerak/barang inventaris				
	PL.01.02	b. Tanah dan Bangunan				
	PL.01.05/ PL.01.07 / PL.01.08 / PL.01.09	3. Jasa				
	PL.01.06	4. Jaringan/ <i>software</i> komputer				
	PL.02	Penyimpanan barang dan distribusi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PL.02.00	1. Penyimpanan inventaris kekayaan negara				
		a. surat bukti barang masuk				
		b. surat bukti pengeluaran barang				
	PL.02.01	Pendistribusian				
		Surat jalan				
	PL.03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				
		1. SIMAK BMN	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	PL.03.00	2. Pembukuan BMN			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		a. Daftar barang kuasa/pengguna				
		b. Kartu identitas barang (KIB)				
	PL.03.01	3. Daftar Barang Ruangan (DBR)				

	PL.03.02	4. Inventarisasi BMN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		a. Keputusan pembentukan tim				
		b. Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi				
		c. Kertas kerja inventarisasi				
		d. Berita Acara inventarisasi				
		e. Daftar inventarisasi/buku barang/daftar barang				
		f. Laporan hasil inventarisasi				
	PL.03.03	5. Penghapusan BMN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		Pelaksanaan penghapusan BMN				
		a. Keputusan pembentukan tim				
		b. Berita acara penghapusan BMN				
		c. Daftar barang yang dihapus				
		d. Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN termasuk di dalamnya proses lelang				
	PL.03.04	6. Laporan BMN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		a. Laporan kondisi barang				
		b. Laporan barang kuasa pengguna				
		c. Berita acara rekonsiliasi dan internal				
		d. Laporan persediaan habis pakai				
		e. Laporan persediaan tidak habis pakai				

		f. Laporan pengelolaan Barang Milik Negara				
	PL.03.05	Penetapan Status BMN	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
		Pelaksanaan penetapan status BMN			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		Dokumen kepemilikan aset/kekayaan Badan Standardisasi Nasional (sertifikat tanah, IMB, BPKB, STNK, <i>blueprint</i> dan lain-lain)	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PL.04	Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Pemeliharaan gedung dan taman:				
		a. <i>pertamanan/landscaping</i>				
		b. perbaikan gedung				
		c. kebersihan gedung dan taman				
		2. Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer				
		a. Perbaikan/pemeliharaan				
		b. Pemasangan				
V. KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA						
	RT.00	Fasilitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	RT.00.00	Pengurusan kendaraan dinas:				
		1. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas				
		2. Pemeliharaan dan perbaikan				
		3. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan				

	RT.00.01	Administrasi penggunaan ruang rapat				
	RT.00.02	Telekomunikasi				
	RT.01	Perjalanan Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	RT.01.00	1. Administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri				
	RT.01.01	2. Administrasi penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri				
	RT.02	Ketertiban dan keamanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Pengamanan, penjagaan dan pengawal terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas:				
		a. Daftar nama satuan pengamanan				
		b. Daftar jaga/daftar piket				
		c. Catatan gangguan / pelanggaran / kejadian				
		d. Surat izin keluar masuk orang atau barang				
		2. Laporan ketertiban dan keamanan				
		a. Kehilangan				
		b. Kerusakan				
		c. Kecelakaan				
		d. Gangguan				
	RT.03	Sosialisasi/Bimtek/ <i>Workshop</i> Layanan Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ penyuluhan hukum				

		2. Laporan hasil pelaksanaan bimtek/workshop/sosialisasi layanan rumah tangga				
VI. PERENCANAAN						
	PR.00	Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PR.00.00	Rencana pembangunan jangka panjang/master plan (RPJP)				
	PR.00.01	Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)				
	PR.00.02	Rencana strategis (RENSTRA)				
	PR.00.03	Rencana kerja pemerintah (RKP)				
	PR.01	Rencana Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PR.01.00	Usulan Perencanaan Kegiatan				
	PR.01.01	Program Kerja Tahunan				
		1. Usulan unit kerja beserta data pendukung				
		2. Usulan Badan Standardisasi Nasional				
		3. Program kerja tahunan unit kerja				
		4. Program kerja tahunan Badan Standardisasi Nasional				
	PR.01.02	Rencana Kerja				
	PR.02	Penetapan / Kontrak Kinerja	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Kepala Badan Standardisasi Nasional				
		2. Pimpinan unit kerja				
	PR.03	Perencanaan Anggaran				perencanaan, keuangan, dan umum

		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	
		Penyusunan RAPBN				
		1. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas				
		a. Dokumen Rencana Strategis atas rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan				
		b. Dokumen rencana kerja tahunan				
		2. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)				
		3. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) / Standar Biaya Khusus (SBK)				
		Penyusunan RAPBN Pemerintah Kepada DPR-RI				
		1. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-Undang APBN:				
		a. Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan				
		b. Nota Keuangan				
		c. RUU APBN				
		2. Risalah rapat pembahasan anggaran Badan Standardisasi Nasional dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Komisi DPR RI				

		3. Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR				
		4. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN				
		a. Tanggapan masing-masing fraksi				
		b. Jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi				
		5. Nota jawaban DPR-RI terkait dengan pembahasan RUU APBN dengan Komisi VI DPR RI				
		Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah				
		Keputusan Presiden tentang Rincian APBN				
		Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya				
		Target Penerimaan Negara Bukan Pajak				
		Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P:				
		1. Tanggapan masing-masing fraksi				
		2. Jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi				
		Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)				
		Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P				
	PR.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum

	PR.03.01	Standar Biaya Keluaran (SBK)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PR.04	Revisi Dokumen Anggaran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PR.04.00	1. Revisi DIPA dan POK				
	PR.04.01	2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P)				
	PR.05	Penyusunan Laporan	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
	PR.05.00	Laporan Berkala				
		1. Laporan bulanan unit kerja				
		2. Laporan triwulan unit kerja				
		3. Laporan semesteran unit kerja				
		4. Laporan tahunan unit kerja				
		5. Laporan tahunan Badan Standardisasi Nasional				
	PR.05.01	Laporan Khusus/insidental				
	PR.05.02	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)				
		1. LAKIP Unit Kerja				
		2. LAKIP Badan Standardisasi Nasional				
	PR.06	Evaluasi program dan anggaran	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	perencanaan, keuangan, dan umum
		1. Evaluasi program unit kerja				
		2. Evaluasi program Badan Standardisasi Nasional				
VII. HUKUM						

HK.00	Program Legilasi	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
HK.00.00	Program Legilasi Nasional				
	Bahan/materi program legilasi nasional dari Badan Standardisasi Nasional				
HK.00.01	Program Legilasi BSN				
HK.01	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
HK.01.00	1. Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
HK.01.02	2. Rancangan Peraturan pemerintah, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
HK.01.03	3. Rancangan Peraturan Menteri atau Rancangan Peraturan Lembaga Lain				
HK.01.04	4. Rancangan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum)				
HK.02	Instrumen Hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
HK.02.00	1. Rancangan Keputusan/Instruksi Presiden, rancangan awal sampai				

		dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
	HK.02.01	2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum)				
	HK.02.04	3. Instruksi/Surat Edaran (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)				
	HK.03	Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Eksternal				
		Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi				
		2. Internal				
		Produk Peraturan Perundangan Badan Standardisasi Nasional yang dijadikan referensi				
	HK.04	Kasus/Sengketa Hukum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	HK.04.00	1. Pidana				
		Berkas tentang kasus/sengketa pidana				
		a. proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan				
		b. berkas pembelaan dan bantuan hukum				

		c. telaah hukum opini hukum				
	HK.04.01	2. Perdata				
		Berkas tentang kasus/sengketa perdata				
		a. analisa hukum				
		b. berkas pembelaan dan bantuan hukum				
		c. telaah hukum opini hukum				
	HK.04.02	3. Tata Usaha Negara				
		a. analisa hukum				
		b. berkas pembelaan dan bantuan hukum				
		c. telaah hukum opini hukum				
	HK.04.03	4. Yudisial Review				
		Berkas tentang kegiatan yudisial review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung				
	HK.04.04	5. Arbitrase				
		Berkas tentang kasus/sengketa Arbitrase				
		a. analisa hukum				
		b. berkas pembelaan dan bantuan hukum				
		c. telaah hukum opini hukum				
	HK.05	Analisa dan Pengkajian Hukum	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	HK.05.00	1. Analisa dan pengkajian peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum baik nasional dan internasional				
	HK.05.01	2. Analisa dan pengkajian terhadap rancangan kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian				

	HK.06	Bimbingan Teknis/ <i>Workshop</i> / Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> / sosialisasi/ penyuluhan hukum				
		2. Laporan hasil pelaksanaan bimtek/ <i>workshop</i> / sosialisasi/ penyuluhan hukum				
		Bantuan / konsultasi hukum/advokasi	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum				
VIII. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
	OT.01	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	OT.01.00	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Struktural/Fungsional Tertentu/Fungsional Umum				
	OT.01.02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja				
	OT.02	Standar Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	OT.03	Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	OT.04	Tata Laksana	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	OT.04.01	Proses Bisnis				
	OT.04.02	Sistem Manajemen Mutu				

	OT.05	Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		Internalisasi reformasi birokrasi				
IX. HUBUNGAN MASYARAKAT						
	HM.00	Peliputan dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Siaran pers/konferensi pers/ <i>press release</i> /wawancara				
		2. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik				
		3. Kunjungan wartawan/peliputan				
		4. Layanan informasi publik				
	HM.01	Dokumen Persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Kepala Badan Standardisasi Nasional)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Bahan sidang kabinet				
		2. RDP DPR/DPD RI				
		3. Rako tingkat Badan termasuk hasil rumusan				
		4. Bahan rapat terbatas Badan Standardisasi Nasional				
		5. Pidato Kepala Badan Standardisasi Nasional				
	HM.02	Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi:	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	HM.02.00	1. Hubungan antar lembaga pemerintah				

	HM.02.01	2. Hubungan antar Organisasi Standardisasi Nasional dan Internasional				
	HM.02.02	3. Hubungan dengan perusahaan				
	HM.02.03	4. Hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan asosiasi				
	HM.02.04	5. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah				
	HM.02.05	6. Forum Kehumasan (Bakohumas)				
	HM.02.06	7. Hubungan dengan media massa				
	HM.03	Keprotokolan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	HM.03.00	1. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)				
	HM.03.01	2. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri				
		a. Kunjungan dinas Kepala Badan Standardisasi Nasional				
		b. Kunjungan dinas Eselon I				
		c. Kunjungan dinas pejabat lain				
	HM.03.02	3. Agenda kegiatan pimpinan Badan Standardisasi Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
	HM. 04	Dokumentasi dan Penerbitan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		1. Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal				

		2. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan:				
		a. Klipping koran				
		b. Brosur/ <i>leaflet</i> /poster/plakat				
		c. Pengumuman/Pemberitaan				
	HM.05	Pameran/Sayembara/Lomba	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		Kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi				
	HM.06	Tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sumber daya manusia, organisasi, dan hukum
		Administrasi pemberian tanda kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang standardisasi				
X. PENGAWASAN						
	PW.00	Rencana Pengawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	pengawasan intern
		1. Rencana strategis pengawasan				
		2. Rencana kerja tahunan				
		3. Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan				
		4. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional				
	PW.01	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	pengawasan intern
	PW.01.00	1. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan				

		Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut				
	PW.01.01	2. Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)				
	PW.01.02	3. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut				
	PW.01.03	4. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut				
	PW.01.04	5. Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat				
	PW.01.05	6. Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan				
	PW.01.06	7. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Badan Standardisasi Nasional				
		8. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara				
	PW.01.08	9. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>				
	PW.01.11	10. Seminar/Lokakarya Pengawasan	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	pengawasan intern

		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi / penyuluhan hukum				
		b. Laporan hasil pelaksanaan seminar/lokakarya pengawasan				
	PW.01.12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	pengawasan intern

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR :19 TAHUN 2019

TENTANG :

PETUNJUK PELAKSANAAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

FUNGSI SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH (YANG MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG)
I. AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI						
1.	AS.00	Akreditasi Lembaga Sistem Manajemen				
	AS.00.00	Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
	AS.00.01	Kerjasama Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
	AS.00.02	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen				
	AS.00.03	Pelatihan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen				
	AS.00.04	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Pengembangan				

		Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen				
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ penyuluhan hukum				
		b. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi/Sosialisasi/Workshop/ Seminar				
2.	AS. 01	Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan				
	AS.00.00	Layanan Jasa Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
	AS.00.01	Kerjasama Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
	AS.00.02	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan				
	AS.00.03	Pelatihan Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan				
	AS.00.04	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Pengembangan Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan				
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ penyuluhan hukum				
		b. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi/Sosialisasi/Workshop/ Seminar				

		Pengembangan Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan				
3.	AS.02	Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel				
	AS.02.00	Layanan Jasa Produk, Pelatihan dan Personel	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
	AS.02.01	Kerjasama Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
	AS.02.02	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel				
	AS.02.03	Pelatihan Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel				
	AS.02.04	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel				
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ penyuluhan hukum				
		b. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi/Sosialisasi/Workshop/ Seminar Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel				
II. AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI						
1.	AL.00	Akreditasi Laboratorium Penguji				

	AL.00.00	Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium Penguji	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi laboratorium
	AL.00.01	Kerjasama Akreditasi Laboratorium Penguji	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi laboratorium
	AL.00.02	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Penguji				
	AL.00.03	Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Penguji				
	AL.00.04	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Akreditasi Laboratorium Penguji				
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ akreditasi laboratorium penguji				
		b. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi/Sosialisasi/Workshop/ Seminar Akreditasi Laboratorium Penguji				
	AL.00.05	Uji Profisiensi Laboratorium	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi laboratorium
	AL.00.06	Bimbingan Teknis Uji Profisiensi Laboratorium	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi laboratorium
	AL.00.07	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop				

		/Seminar Pengembangan Uji Profisiensi Laboratorium				
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ uji profisiensi laboratorium				
		b. Laporan hasil pelaksanaan koordinasi/Sosialisasi/Workshop/ Seminar Pengembangan Uji Profisiensi Laboratorium				
2.	AL.01	Akreditasi Laboratorium Kalibrasi				
	AL.01.00	Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi laboratorium
	AL.01.01	Kerjasama Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi laboratorium
	AL.01.02	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi				
	AL.01.03	Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Kalibrasi				
		a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan bimtek/ <i>workshop</i> /sosialisasi/ uji profisiensi laboratorium				
		b. hasil pelaksanaan koordinasi/Sosialisasi/Workshop/ Seminar Pengembangan Uji Profisiensi Laboratorium				

	AL.01.05	Monitoring Kompetensi Laboratorium Kalibrasi				
	AL.01.06	Pengembangan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Ketelusuran Standar Fisik				
	AL.01.07	Layanan Jasa Akreditasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi laboratorium
	AL.01.08	Kerjasama Akreditasi Laboratorium Penyelenggaraan Uji Profisiensi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi laboratorium
	AL.01.09	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi				
	AL.01.10	Pengembangan Kopetensi Personel Akreditasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi				
	AL.01.11	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Pengembangan Akreditasi Penyelenggaraan Uji Profisiensi				
	AL.01.12	Layanan Jasa Akreditasi Produsen Bahan Acuan				
	AL.01.13	Kerjasama Akreditasi Produsen Bahan Acuan				
	AL.01.14	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Produsen Bahan Acuan				

	AL.01.15	Pengembangan Kopetensi Personel Akreditasi Produsen Bahan Acuan				
	AL.01.16	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Pengembangan Akreditasi Produsen Bahan Acuan				
3.	AL.02	Akreditasi Lembaga Inspeksi				
	AL.02.00	Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Inspeksi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi laboratorium
	AL.02.01	Kerjasama Akreditasi Lembaga Inspeksi				
	AL.02.02	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Lembaga Inspeksi				
	AL.02.03	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Inspeksi				
	AL.02.04	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Pengembangan Akreditasi Lembaga Inspeksi				
	AL.02.05	Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium Medik	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	akreditasi laboratorium
	AL.02.06	Pengembangan dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Medik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	akreditasi laboratorium
	AL.02.07	Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium Medik				

	AL.02.08	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Pengembangan Akreditasi Laboratorium Medik				
III.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1.	LB.00	Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
	LB.00.00	Pedoman Penelitian dan Pengembangan Standardisasi				
	LB.00.01	Rencana Strategis Penelityian dan Pengembangan				
2.	LB.01	Pembinaan Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
3.	LB.02	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
4.	LB.03	Kerjasama di Bidang Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
5.	LB.04	Pemantauan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
	LB.04.00	Pemantauan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi				
	LB.04.01	Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi				

6.	LB.05	Tata Operasional Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
7.	LB.06	Publikasi Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
IV. SISTEM PENERAPAN STANDAR						
1.	SP.00	Kebijakan Terkait Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan Serta Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2.	SP.01	Prasarana Penerapan Standar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
	SP.01.00	Pelaksanaan Sistem Prasarana Penerapan Standar				
	SP.01.01	Inventarisasi Prasarana Penerapan Standar				
	SP.01.02	Identifikasi Prasarana Penerapan Standar				
	SP.01.03	Evaluasi Sistem Prasarana Penerapan Standar				
	SP.01.04	Bimbingan Teknis Prasarana Penerapan Standar				
	SP.01.05	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Prasarana Penerapan Standar				

3.	SP.02	Sistem Jaminan Mutu	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
	SP.02.00	Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu				
	SP.02.01	Inventarisasi Sistem Jaminan Mutu				
	SP.02.02	Identifikasi Sistem Jaminan Mutu				
	SP.02.03	Evaluasi Sistem Jaminan Mutu				
	SP.02.04	Bimbingan Teknis Sistem Jaminan Mutu				
	SP.02.05	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar Sistem Jaminan Mutu				
4.	SP.03	Penerapan Standar Wajib	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
5.	SP.04	Penerapan Standar Sukarela	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
	SP.04.00	Skema Penerapan SNI				
	SP.04.01	Penggunaan Tanda SNI				
6.	SP.05	Penanganan dan Pengaduan Penerapan Standar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
7.	SP.06	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemberlakuan Standar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
V. PERUMUSAN STANDAR						

1.	PS.00	Kebijakan Nasional Pengembangan SNI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	bidang pengembangan standar
	PS.00.00	Kelembagaan Manajemen Teknis Perumusan Standar/Komisi Kebijakan Pengembangan Standar				
	PS.00.01	Kebijakan Pedoman Standardisasi Nasional				
	PS.00.02	Kebijakan Ruang Lingkup Komite Teknis				
	PS.00.03	Kebijakan Keanggotaan Komite Teknis				
	PS.00.04	Kebijakan Program Nasional Perumusan Standar				
2.	PS.01	Penyelenggaraan Perumusan Standar				
	PS.01.00	Kelembagaan Komite Teknis/SubKomite Teknis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	bidang pengembangan standar
	PS.01.01	Perumusan SNI	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	bidang pengembangan standar
	PS.01.02	Pemeliharaan SNI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	bidang pengembangan standar
	PS.01.03	Evaluasi Kinerja Komite Teknis	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BSN	bidang pengembangan standar
3.	PS.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perumus SNI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	bidang pengembangan standar

	PS.02.00	Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia				
4	PS.03	Harmonisasi SNI				
	PS.03.00	Partisipasi di Forum Pengembangan Standar tingkat Regional, Bilateral, dan Internasional				
	PS.03.01	Kelembagaan <i>National Mirror Committee (NMC)</i>				
	PS.03.02	Tanggapan Indonesia Terhadap Draft Standar Standar Internasional				
VI.KERJASAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN						
1.	KS.00	Kebijakan Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
2.	KS.01	Kerjasama Standardisasi Internasional				
	KS.01.00	Kerjasama Multilateral				
	KS.01.01	Kerjasama Bilateral dan Regional				
	KS.01.02	Notifikasi WTO				
	KS.01.03	<i>Enquiry</i>				
	KS.01.04	Pemenuhan Kewajiban Internasional Lain				
3.	KS.02	Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
	KS.02.00	Kerjasama Standardisasi Mitra Kementerian/Lembaga				
	KS.02.01	Kerjasama Standardisasi Mitra Perguruan Tinggi				

	KS.02.02	Kerjasama Standardisasi Mitra Pemerintah Daerah				
	KS.02.03	Kerjasama Standardisasi Mitra Swasta				
4.	KS.03	Implementasi Kerjasama Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
5.	KS.04	Sinkronisasi Kerjasama Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
6.	KS.05	Monitoring Evaluasi Kerjasama Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
7.	KS.06	Jasa Layanan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
8.	KS.07	Pengembangan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	hubungan masyarakat, kerja sama, dan layanan informasi
VII. SISTEM DAN LAYANAN INFORMASI STANDARDISASI						
1.	IS.00	Kebijakan Mengenai Sistem dan Layanan Informasi Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	data dan sistem informasi
	IS.00.00	Kebijakan Mengenai Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi				
	IS.00.01	Kebijakan Mengenai Dokumentasi dan Perpustakaan Standardisasi				
2.	IS.01	Pengelolaan Sistem Komunikasi Data	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	data dan sistem informasi

	IS.01.00	Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi				
	IS.01.01	Penanganan Keluhan Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi				
3.	IS.02	Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	data dan sistem informasi
	IS.02.00	Pengelolaan Server				
	IS.02.01	Penanganan Surat Elektronik (<i>Email</i>)				
	IS.02.02	Pengelolaan Jaringan (Kabel dan Nirkabel)				
	IS.02.03	Penanganan Masalah Jaringan				
	IS.02.04	Keamanan Informasi				
	IS.02.05	Koordinasi/Focus Group Discussion (FGD)/Sosialisasi/Workshop /Seminar				
4.	IS.04	Dokumentasi SNI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	data dan sistem informasi
	IS.04.00	Dokumentasi SNI				
	IS.04.01	Pengelolaan Data SNI				
	IS.04.02	Layanan Dokumentasi SNI				
5.	IS.05	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	data dan sistem informasi
	IS.05.00	Pengembangan Koleksi Perpustakaan				
	IS.05.01	Pengolahan Bahan Pustaka				
	IS.05.02	Jasa Perpustakaan				
	IS.05.03	Kerjasama Antar Perpustakaan				

	IS.05.04	Jasa Layanan Standar				
6.	IS.06	Pendayagunaan Informasi Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	data dan sistem informasi
	IS.06.00	Kemasan Informasi Standardisasi				
	IS.06.01	Diseminasi Informasi Standardisasi				
	IS.06.02	Kerjasama Informasi Standardisasi				
	IS.06.03	Terjemah Dokumen Bidang Standardisasi				
	IS.06.04	Layanan Penelusuran Informasi Standardisasi				
VIII. PENDIDIKAN						
1.	PD.00	Kebijakan Mengenai Pendidikan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
2.	PD.01	Layanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia Standardisasi
3.	PD.02	Sistem dan Evaluasi Pendidikan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia
	PD.02.00	Sistem dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi				
	PD.02.01	Sistem dan Evaluasi Pemasarakatan Standardisasi				
4.	PD.03	Bina Profesi Standardisasi	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	riset dan pengembangan sumber daya manusia

IX. PEMASYARAKATAN						
1.	PM.00	Kebijakan Mengenai Pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2.	PM.01	Pemasyarakatan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BSN	penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian
	PM.01.00	Promosi Standardisasi				
	PM.01.01	Partisipasi Masyarakat				

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu